

E-GOVERNMENT DIMENSION

Didi Rosiyadi¹, Nana Suryana², Ade Cahyana³, Nuryani⁴

Pusat Penelitian Informatika, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
Jln. Cisitu No. 21/154D Bandung

e-mail: ¹rosiyadi@informatika.lipi.go.id, ²surya@informatika.lipi.go.id,

³cahyana@informatika.lipi.go.id, ⁴nuryani@informatika.lipi.go.id

ABSTRAKSI

Makalah ini mengemukakan *E-Government Dimension* yang merupakan salah satu hasil Tahapan Pengumpulan Data, dimana tahapan ini adalah bagian dari penelitian kompetitif di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 2007 yang sekarang sedang dilakukan. Data *E-Government Dimension* ini didapatkan dari berbagai sumber yang meliputi *E-Government* beberapa Negara di dunia, *E-Government* yang dibangun oleh beberapa penyedia aplikasi *E-Government*. *E-Government Dimension* terdiri dari tiga dimensi yaitu *Democratic Dimension*, *Service Dimension* dan *Administrative Dimension*. *Democratic Dimension* difokuskan pada proses-proses politik dan interaksi diantara konstituante dengan pemerintah ataupun sebaliknya, *Service Dimension* meliputi seluruh jenis layanan secara elektronik dan *Administrative Dimension* terdiri dari seluruh jenis manajemen dan lingkungan internal organisasi serta kegiatan operasional yang dilakukan sehari-hari. Selanjutnya *E-Government Dimension* ini dapat dijadikan panduan awal dalam pembangunan kerangka kerja *E-Government* di Indonesia (*E-Government Framework*).

Kata kunci: *E-Government*, *E-Government Dimension*, *Democratic*, *Administrative*, *Service*

1. LATAR BELAKANG

Di Indonesia perkembangan *E-Government* semakin pesat. Hal ini dapat dilihat dengan makin banyaknya penggunaan internet pada berbagai bidang. Salah satunya adalah dalam bidang pemerintahan. Sudah banyak aplikasi-aplikasi pemerintahan yang bisa diakses secara *on-line* oleh masyarakat diantaranya layanan pajak, perbankan, pendidikan, pekerjaan, hukum, kesehatan, militer, pertanian, agama dan banyak lagi layanan-layanan lainnya. Tetapi layanan-layanan tersebut masih terpisah satu dengan lainnya padahal dalam *E-Government* haruslah ada kolaborasi diantara layanan-layanan tersebut (*single portal web*). Pengembangan *E-Government* memerlukan kerangka kerja acuan pengembangan *E-Government* di Indonesia (*E-Government Framework*).

2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dari makalah ini adalah sebagai landasan dalam pembangunan *E-Government Framework* di Indonesia. Sedangkan sasarannya adalah mendukung program pemerintah dalam mewujudkan *good governance* dan mewujudkan masyarakat informasi melalui pembangunan *E-Government*.

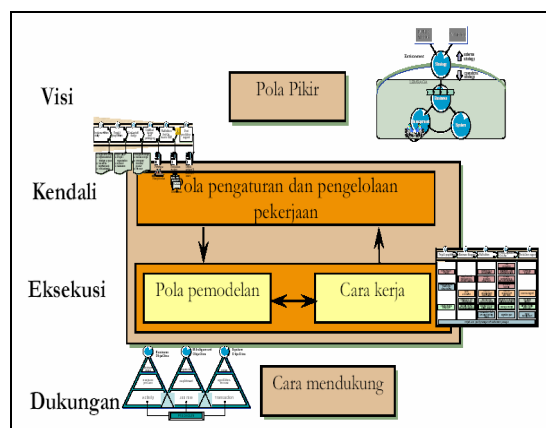
3. TINJAUAN UMUM TENTANG E-GOVERNMENT

E-Government, berdasarkan definisi The World Bank (www.worldbank.org) adalah penggunaan teknologi informasi oleh kantor pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, bisnis dan untuk memfasilitasi kerjasama antar institusi pemerintah. Dalam prakteknya, *e-Government* adalah penggunaan Internet untuk menyelenggarakan

administrasi pemerintahan dan menyediakan layanan publik yang lebih baik sebaik bentuk pendekatan berorientasi pada layanan publik.

Berdasarkan definisi di atas, ada paling sedikit tiga bagian penting dalam aplikasi *e-Government*. Pertama, *e-Government* menyediakan layanan dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat (*G2C - Government to Citizen*), yang kedua antara pemerintah dengan sektor bisnis (*G2B - Government to Business*) dan yang ketiga inter-pemerintah dan antar institusi pemerintah (*G2G - Government to Government*).

Metodologi Pengembangan *e-Government* Pengembangan *e-government* mengandung empat unsur utama yaitu visi, kendali, eksekusi dan dukungan. Keempat unsur saling terkait erat antara satu dengan lainnya, sehingga menghasilkan satu kegiatan pengembangan yang utuh, digambarkan secara visual pada Gambar 1.



Gambar 1. Metodologi Pengembangan E-Government

Dari Gambar 1 dapat dijabarkan bahwa Visi terdiri atas strategi, proses bisnis, organisasi dan sistem. Kendali dilakukan untuk memberikan jaminan keberhasilan dari setiap proses bisnis sesuai target yang ditetapkan (*Quality Assurance - QA*) yang bersifat lebih dari sekedar verifikasi, melebur di dalam proses dan tindakan setelah pemeriksaan. Eksekusi merupakan langkah pelaksanaan meliputi kegiatan studi implementasi, persiapan proyek, desain konseptual, desain rinci & pembuatan *prototype*, realisasi dan dukungan setelah implementasi. Sedangkan Dukungan merupakan dukungan pengembangan e-Government terutama menyangkut masalah koordinasi antar lembaga, bahan acuan, kebijakan serta regulasi dan standar pengembangan yang digunakan secara nasional.

Tujuan Pengembangan *e-Government* adalah pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat, pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional, pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara dan pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

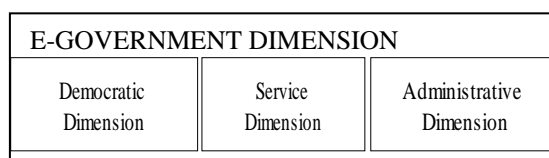
Level Pengembangan e-Government terdiri dari menyediakan informasi, interaksi satu arah, misalnya dengan fasilitas mengunduh (*download*) formulir yang dibutuhkan, interaksi dua arah, misalnya dengan fasilitas pengumpulan formulir secara online, transaksi yang mempunyai arti layanan elektronik secara penuh, ditandai dengan adanya fasilitas pembuatan keputusan, penyerahan dan pembayaran proses secara *online*.

Pengembangan *e-Government* dilandasi oleh empat infrastruktur utama, yaitu Suprastruktur *e-Government* yang memuat antara lain kepemimpinan manajemen lembaga (*e-leadership*), sumber daya manusia (*human resource*) dan peraturan di lembaga yang terkait (*regulation*), Infrastruktur jaringan yang memuat antara lain protokol komunikasi, topologi, teknologi dan keamanan, Infrastruktur informasi yang memuat antara lain struktur data, format data, metoda berbagi data (*data sharing*) dan sistem pengamanannya dan Infrastruktur aplikasi yang memuat antara lain aplikasi layanan publik, aplikasi antar muka (*interface*) dan aplikasi organisasi pendukung (*back office*).

4. E-GOVERNMENT DIMENSION

E-Government Dimension terdiri dari tiga dimensi yaitu *Democratic Dimension*, *Service Dimension* dan *Administrative Dimension*. *Democratic dimension* difokuskan pada proses-proses politik dan interaksi diantara konstituante dengan pemerintah ataupun sebaliknya, salahsatu contoh adalah interaksi antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Pemerintah, DPRD dengan pemerintah daerah dan lain sebagainya.

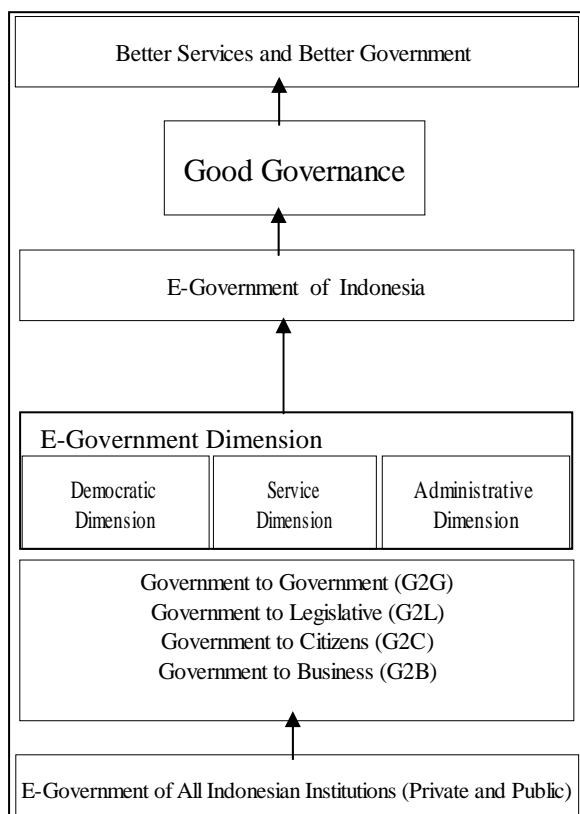
Service Dimension meliputi seluruh jenis layanan secara elektronik, dimana ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkannya, diantaranya pembuatan KTP, SIM, memperoleh informasi bisnis, pekerjaan, dan seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia lainnya.



Gambar 2. E-Government Dimension

Administrative Dimension terdiri dari seluruh jenis manajemen dan lingkungan internal organisasi serta kegiatan operasional yang dilakukan sehari-hari, yang menunjukkan suatu kegiatan pemerintahan dalam masing-masing institusi untuk mencapai *good governance* (sistem pemerintahan yang baik) menuju *better government* (Pemerintahan yang terbaik).

Penerapan *E-Government Dimension* dapat berupa *Government to Government*, *Government to Legislatives*, *Government to Citizens*, *Government to Business*. Penerapan didukung oleh *e-government* seluruh instansi baik pemerintah maupun swasta. Selanjutnya akan mendukung terciptanya *Good Governance* menuju *Better Service* (layanan yang terbaik) yang mempunyai enam kunci utama yaitu Mencapai efisiensi yang lebih besar dari hasil investasi, menjamin akses yang tepat untuk pelayanan-pelayanan dan informasi pemerintah, memberi pelayanan-pelayanan yang responsif sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat Indonesia baik secara individual, bisnis dan organisasi-organisasi kemasyarakatan, pelayanan-pelayanan yang terhubung secara terintegrasi. Pengalaman-pengalaman membangun dan kepercayaan user dalam penggunaan teknologi baru dan Meningkatkan Persatuan dan kesatuan bangsa melalui kebijaksanaan yang dibuat.



Gambar 2. Tahapan menuju Better Service dan Better Government di Indonesia

5. KESIMPULAN

E-Government Dimension mendukung terbentuknya *E-Government Framework* yang selanjutnya *E-Government Framework* akan menjadi kerangka kerja acuan dalam pengembangan *E-Government* di Indonesia. Dimana *E-Government Dimension* terdiri dari tiga dimensi yaitu *Democratic Dimension*, *Service Dimension* dan *Administrative Dimension* yang mempunyai jenis-jenis layanan *Government to Government (G2G)*, *Government to Legislative (G2L)*, *Government to Citizens (G2C)*, dan *Government to Business (G2B)*.

6. SARAN

Diharapkan dapat dilakukan penelitian secara seksama dan secara terinci menangani *E-Government Dimension* sehingga akan memberikan kontribusi bagi pengembangan *E-Government* di Indonesia.

PUSTAKA

- Arild Jansen, *Assesing E-Government Progress*, www.afin.uio.no, Oslo, Norway, 2001
 Cabinet Office, *E-Government Strategy Framework Policy and Guidelines*, www.cabinet-office.gov.uk, United Kingdom, 2002
 Department of Veteran Affairs Committee, *DVA E-Government Framework*, www.dva.gov.au, Australia, 2005

- Departemen Komunikasi dan Informatika, *Panduan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga*, www.kominfo.go.id, Jakarta, Indonesia, 2003
 Dimitar Doychinov, *Applying the E-Government Framework in Bulgaria*, www.bpap.org, Bulgaria, 2002
 Departemen Komunikasi dan Informatika, *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*, www.kominfo.go.id, Jakarta, Indonesia, 2003
 Hongkong Officer, *Interoperability Framework*, www.ogcio.gov.hk, Hongkong, 2006
 IDA Programs, *The European Dimension of E-Government*, unpan1.un.org, United Kingdom, 2003
 Markus Lassing, *E-Government-The Regional Dimension*, www.biser-eu.com, United Kingdom, 2004
 Pruchya, *E-Government Framework in Thailand*, www.cdg.co.th, Thailand, 2004
 State of Alabama, *E-Government Framework and Strategy*, www.alabama.gov, USA, 2001
 The world bank group, *E-Government Definition*, www.worldbank.org/publicsector/egov, Washington, USA, 2001.